

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH: STUDI PADA KOTA MANADO (TAHUN 2010-2014)

ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF FINANCIAL MANAGEMENT AND DEGREE OF LOCAL INDEPENDENCE IN THE ERA OF REGIONAL AUTONOMY: STUDIES IN THE CITY OF MANADO (2010-2014)

Cheris Enjelita Kaunang¹, Amran T Naukoko² dan Albert T Londa³

^{1, 2, 3} Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email: cheris.angelita@yahoo.com

ABSTRAK

Untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Manado sangat penting dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan daerah tersebut terlebih dahulu. Beberapa alat analisis digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis rasio kemandirian keuangan daerah, analisis efektifitas, analisis aktivitas dan analisis pertumbuhan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan Kota Manado dari tahun 2010-2014 dan apakah Pemerintah Kota Manado sudah mandiri atau belum dalam membiayai daerah sendiri. Dan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Manado masih kurang mandiri dalam membiayai daerah sendiri, namun Pemerintah Kota Manado masih terus berusaha untuk bisa mandiri jika dilihat dari peningkatan hasil persentase kemandirian keuangan daerah, Pemerintah Kota Manado juga sangat efektif dalam merealisasikan PAD terbukti dari hasil persentase rasio efektivitas yang rata-ratanya 106.95% dan selalu mengalami peningkatan di tiap tahun, dari rasio aktivitas bisa dilihat bahwa Pemerintah Kota Manado lebih memprioritaskan anggaran pada belanja pembangunan dibanding belanja rutin, dan pertumbuhan Kota Manado sudah cukup baik meskipun masih kurang stabil.

Kata Kunci : Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, Kemandirian Daerah, Otonomi Daerah

ABSTRACT

To make the policy in the area of financial management in the city of Manado is very important to do an analysis of the ratio of the area of financial independence, effectiveness analysis, activity analysis and analysis of growth. The purpose of the study is to examine the performance of the financial management of the 2010-2014 Manado City and Manado City Government is already self-sufficient or not to finance his own area. And the results of this study concluded that Manado City Government is still unable to act independently in financing his own area, but the Manado City Government is still trying to be independent when viewed from an increase in the percentage of local financial independence, Manado City Government is also very effective in realizing PAD evident from the results the percentage of effectiveness ratio averaged 106.95% and always increased in each year of the activity can be seen that the ratio of Manado City Government to prioritize the budget on development expenditure compared to expenditure compared to expenditure, and the growth of the city of Manado is quite good, although still less stable.

Keywords : ED, FDI and, Economic Growth

1. PENDAHULUAN

Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Adapun tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menurut UU No. 32 Tahun 2005 adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan atau Financing Reform.

Maka untuk mencapai pembangunan disuatu Negara diperlukan adanya pembiayaan dengan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional demokratis transparan dan efisien. Pembiayaan suatu daerah diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah beserta satuan kerjanya guna memenuhi pelayanan publik. Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik maka berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk itulah, peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan guna mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Salah satu elemen dari APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu [1], pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja daerah Kota Manado dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan [2].

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah Kota Manado tahun anggaran 2010-2014.

Tinjauan Pustaka

Otonomi Daerah

Menurut pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kinerja dan Akuntabilitas

Istilah kinerja merupakan terjemahan dari kata *performance* yang berarti penampilan atau prestasi. Murfy dan Cleveland, mendefinisikan *performance* sebagai *countable outcomes*. Sementara Whittaker menyebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goals and objective*). Menurut Gasperz *performance* adalah pemberian pelayanan yang produktif, efektif, dan efisien serta berkualitas berupa pengendalian terus-menerus dari manajemen pemerintah sehingga dapat meningkatkan kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan menurut Widjaya [3], kinerja adalah prestasi pegawai dan pengembangan profesi di masa datang dilakukan dengan sistematis dan formal.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, dan value for money. Transparansi merupakan wujud adanya keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. Dalam prinsip ini, anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan bersama, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

Adapun prinsip akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

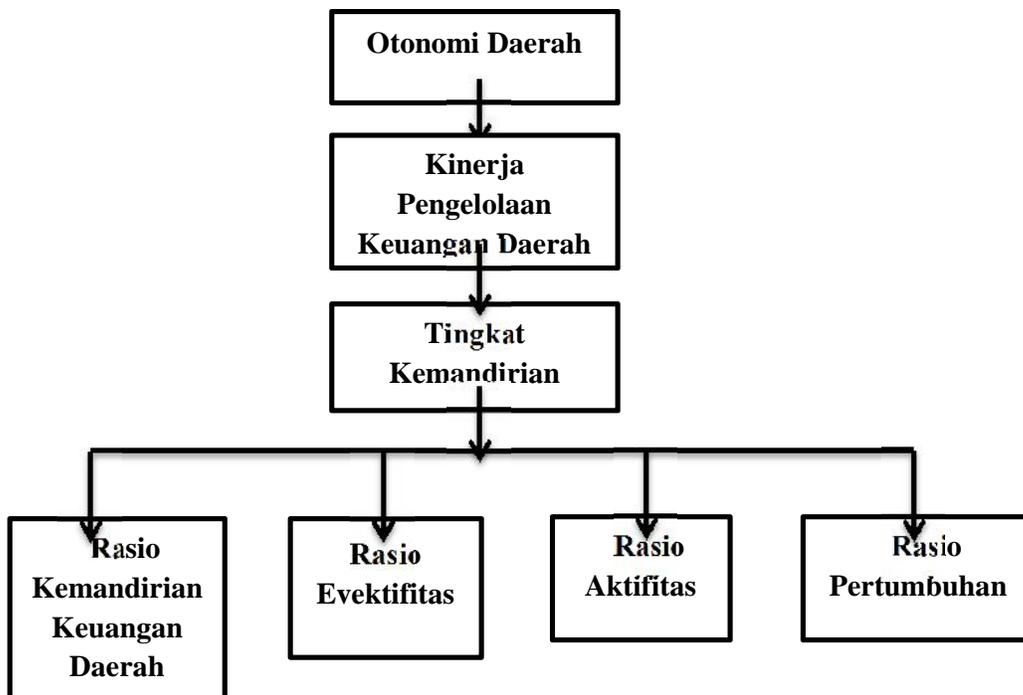
Penelitian Terdahulu

Rismawan Imawan dan Agus Wahyudin (2014) yang berjudul “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012 yang menggunakan metode regresi berganda menyimpulkan bahwa secara parsial variabel belanja modal dengan arah negatif berpengaruh.

Oesi Agustina. A (2013) yang berjudul “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: (Studi Kasus Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011)” dengan menggunakan metode analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Dari hasil analisis rasio keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian Kota Malang yang terus membaik.

HERI TRIYONO (2013) yang berjudul “Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo APBD 2009-2011” dengan menggunakan metode analisis rasio menyimpulkan bahwa rasio kemandirian rendah dengan tingkat ketergantungan dari pihak eksternal masih tinggi. Rasio efektivitas yang dicapai tinggi. Rasio efisiensi menunjukkan dalam memungut PAD sudah efisien. Rasio aktivitas pada belanja pembangunan masih rendah. Rasio pertumbuhan menunjukkan hasil yang positif. Rasio derajat desentralisasi rendah.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah atau prosedur yang akan dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan.

Jenis Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. Jenis Data yang digunakan dalam bentuk: Data Pendapatan Asli Daerah, Data Pendapatan, Data Belanja Rutin, dan Data Belanja Pembangunan Kota Manado.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kota Manado dengan pengambilan data melalui Badan Pusat Statistik. Waktu penelitian adalah Februari-April 2016.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah dan kemandirian Kota Manado.

1. Menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

2. Menghitung Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3. Menghitung Rasio Aktivitas

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

4. Menghitung Rasio Pertumbuhan

$$\text{Persentase Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD tahun } p - \text{PAD tahun } p-1}{\text{PAD tahun } p-1} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan tahun } p - \text{pendapatan tahun } p-1}{\text{Pendapatan tahun } p-1} \times 100\%$$

Persentase Pertumbuhan Belanja Rutin Daerah =

$$= \frac{\text{Belanja rutin tahun } p - \text{Belanja rutin tahun } p-1}{\text{Belanja rutin tahun } p-1} \times 100\%$$

Persentase Pertumbuhan Belanja Pembangunan

$$= \frac{\text{Belanja Pembangunan tahun } p - \text{Belanja Pembangunan tahun } p-1}{\text{Belanja Pembangunan tahun } p-1} \times 100\%$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kota Manado dengan menggunakan Analisis Rasio terhadap APBD pada tahun 2010-2014.

Aspek-aspek tersebut dapat diketahui dengan melakukan analisis rasio sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah, (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan.

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 4.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Bantuan Pemerintah Kota Manado Tahun 2010-2014

Tahun	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2010	17.83%
2011	23.45%
2012	22.33%
2013	28.51%
2014	30.24%

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio Kemandirian Keuangan Daerah diatas dapat dilihat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan, pemerintahan dan dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2010-2014 masih rendah dengan rata-rata 24.47% kurang dari 50%, yakni pada tahun 2010 hanya sebesar 17.83%, pada tahun 2011 sebesar 23.45%, tahun 2012 sebesar 22.33%, tahun 2013 sebesar 28.51%, dan pada tahun 2014 yaitu sebesar 30.24%.

Meskipun kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kota Manado masih kurang baik namun ada peningkatan di tahun 2010 yang hanya 17.83% meningkat menjadi 23.45% ada ada peningkatan sebesar 5.62% ditahun 2011, walaupun pada tahun 2012 turun sebesar 22.33% atau turun 1.12% dari tahun 2011, namun kembali meningkat pada tahun 2013 sebesar 28.51% atau meningkat 6.18% dari tahun 2012. dan terus meningkat ditahun 2014 sebesar 30.24% atau meningkat 1.73% dari tahun 2013.

Rasio Efektivitas

Rasio Efektifitas, menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.2. Rasio Efektivitas Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Manado Tahun 2010-2014

Tahun	Rasio Efektifitas
2010	102.52%
2011	107.02%
2012	107.12%
2013	111.39%
2014	112,05%

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio Efektivitas diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kota Manado sangat baik karena realisasi PAD diatas 100% dengan rata-rata 106.95%, yaitu pada tahun 2010 sebesar 102.52% meningkat menjadi 107.02% pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 4.5% dari tahun 2010, dan pada tahun 2012 meningkat sebesar 107.12% atau sebesar 0.1% dari tahun 2011. Realisasi PAD kembali meningkat pada tahun 2013 yaitu sebesar 111.39% atau sebesar 4.27% dari tahun 2012, dan terus meningkat pada tahun 2014 sebesar 112,05% atau sebesar 0.66% dari tahun 2013.

Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas, menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin atau pada belanja pembangunan secara optimal :

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Tabel 4.3. Rasio Aktivitas Total Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Terhadap Total APBD Pemerintah Kota Manado Tahun 2010-2014

Tahun	Belanja Rutin Terhadap APBD (%)	Belanja Pembangunan Terhadap APBD (%)
2010	28,90%	67.69%
2011	35,87%	61.84%
2012	39,93%	58.70%
2013	32,81%	49.72%
2014	40,72%	58.55%

Sumber Data : Badan Pusat Statistik (diolah)

Dari hasil perhitungan rasio Aktivitas diatas bisa dilihat bahwa lebih banyak dana yang dialokasikan untuk belanja pembangunan dibanding untuk belanja rutin. Karena dari kurun waktu 5 tahun anggaran yaitu dari tahun 2010-2014 rata-rata rasio aktivitas untuk belanja pembangunan lebih besar dibandingkan rasio aktivitas belanja rutin, yaitu sebesar 59.30% anggaran untuk belanja pembangunan, sedangkan rata-rata untuk belanja rutin hanya sebesar 35.65%.

Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan, menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode.

$$\text{Persentase Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD tahun } p - \text{PAD tahun } p-1}{\text{PAD tahun } p-1} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan tahun } p - \text{pendapatan tahun } p-1}{\text{Pendapatan tahun } p-1} \times 100\%$$

Persentase Pertumbuhan Belanja Rutin Daerah :

$$= \frac{\text{Belanja rutin tahun } p - \text{Belanja rutin tahun } p-1}{\text{Belanja rutin tahun } p-1} \times 100\%$$

Persentase Pertumbuhan Belanja Pembangunan :

$$= \frac{\text{Belanja Pembangunan tahun } p - \text{Belanja Pembangunan tahun } p-1}{\text{Belanja Pembangunan tahun } p-1} \times 100\%$$

Tabel 4.4. Rasio Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan Pendapatan, Pertumbuhan Belanja Rutin dan Pertumbuhan Belanja Pembangunan Pemerintah Kota Manado Tahun 2010-2014

Tahun	Pertumbuhan PAD	Pertumbuhan Pendapatan	Perumbuhan Belanja Rutin	Pertumbuhan Belanja Pembangunan
2010	25.44%	3.98%	-5.95%	11,87%
2011	48.32%	33.61%	58.52%	16,66%
2012	10.61%	-3.78%	9.38%	-6.70%
2013	44.86%	39.27%	22.78%	26.58%
2014	15.10%	11.12%	30.10%	23.43%

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio Pertumbuhan terhadap pertumbuhan PAD, Pertumbuhan Pendapatan, Pertumbuhan Belanja Rutin dan Pertumbuhan Belanja Pembangunan diatas dapat dilihat dimana untuk Pertumbuhan PAD tahun anggaran 2010-2014 dari tahun 2010 sebesar 25.44% meningkat sebesar 48.32% atau 22.88% pada tahun 2011. Namun pada tahun 2012 perumbuhan PAD menurun sebesar 10.61% atau sebesar 37.71% dari tahun 2011. Dan pada tahun 2013 kembali meningkat sebesar 44.86% , meskipun harus menurun lagi pada tahun 2014 sebesar 15.10%.

Untuk Pertumbuhan Pendapatan bisa dilihat terjadi penurunan ditahun 2012 dan 2014, dimana pada tahun 2011 Pertumbuhan Pendapatan sebesar 33.61% turun menjadi -3.78% atau turun sebesar 37.38%, dan meningkat kembali pada tahun 2013 sebesar 44.86% meskipun harus kembali turun pada tahun 2014 sebesar 11.12% atau sturun sebesar 33.74% dari tahun 2013.

Untuk Pertumbuhan Belanja Rutin dapat dilihat terjadi peningkatan di tiap tahunnya, hanya pada tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 9.36% atau turun sebesar 49.14% dari tahun 2011. Namun untuk tahun selanjutnya terus terjadi peningkatan yaitu pada tahun 2013 sebesar 22.78% dan meningkat kembali pada tahun 2014 sebesar 30.10%.

Sedangkan, untuk Pertumbuhan Belanja Pembangunan terjadi penurunan pada tahun 2012 dan 2014, dimana pada tahun 2011 sebesar 16.66% turun menjadi -6.70% di tahun 2012 atau turun sebesar 23.36% dari tahun 2011, dan kembali meningkat pada tahun 2013 sebesar 26.58%, meskipun pada tahun 2014 kembali menurun sebesar 23.43% atau turun sebesar 3.15% dari tahun 2013.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis rasio-rasio dan pembahasan yang telah diuraikan dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Manado masih kurang mandiri dalam membiayai daerahnya sendiri tapi Pemerintah Kota Manado juga masih terus berusaha untuk bisa mandiri terlihat dari peningkatan-peningkatan yang terjadi tiap tahunnya. Pemerintah Kota Manado juga sangat efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah sehingga bisa dilihat dari rata-rata rasio efektifitas sebesar 106.95% dan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari hasil analisis rasio aktivitas terlihat bahwa Pemerintah Kota Manado lebih memprioritaskan anggarannya pada belanja pembangunan dibanding belanja rutin. Sedangkan pada rasio pertumbuhan sudah cukup baik karena peningkatan lebih dominan terjadi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian Kota Manado, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Manado harus lebih meningkatkan kemandirian pengelolaan keuangan daerah agar bisa lebih mandiri dalam membiayai daerah sendiri.
2. Pemerintah harus lebih memperhatikan pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja rutin karena masih mengalami banyak penurunan dibanding yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

- [1] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah: http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf

Buku

- [2] Abdul Halim dan Theresia Damayanti. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Jurnal

- [3] Lisyani Sriyanthi Batan. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja). Jurnal Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar